ANALISIS PERMASALAHAN KEWARGANEGARAAN BUPATI TERPILIH DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Indah Sari B

10200120144

Hukum Tata Negara

Email: Indahsari2207@gmail.com

No.HP: 089694868901

Abstrak

Warga negara merupakan salah satu unsur dari negara yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah Negara, Indonesia secara tegas tidak menerapkan status kewarganegaraan ganda di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kecuali pada anak dalam kondisi tertentu atau yang disebut dengan prinsip Kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas disini adalah bahwa terhadap anak-anak hasil kawin campur diberikan batas waktu terakhir sampai berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki yaitu memilih antara berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing. Wacana penerapan kewarganegaraan ganda memerlukan kajian, pandangan, dan masukan dari pakar. Kalaupun harus ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia harus tetap menganut sistem kewarganegaraan tunggal, bukan kewarganegaraan ganda, karna kewarganegaraan ganda tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, disamping itu kewarganegaraan ganda juga lebih banyak berdampak negatif bagi bangsa dan Negara Indonesia. Peninjauan kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan untuk menjamin agar warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dapat masih memegang hak atas tanah dengan hak milik dan Hak Guna Bangunan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 menolak sebagian permohonan dan memberikan penafsiran terkait dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam hubungan perkawinan. Namun demikian, ada masalah yang terlihat dalam Pertimbangan Hukum, yaitu kekeliruan, kurangnya pertimbangan dan tidak ada analisis dampak. Di sisi lain, penilaian yang dilakukan secara terpisah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyebabkan tidak terlihatnya perdebatan yang komprehensif atas pokok permasalahan yang diperebutkan. Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan jalan keluar alternatif.

Kata kunci : Kewarganegaraan, kewenangan, mahkamah konstitusi

A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Latar Belakang Masalah

Masalah status kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan eksistensi suatu negara (Muliadi 2019). Berdasarkan prinsip "*ius soli*" seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Prinsip ini salah satunya dianut oleh *United State Of America*(U.S.A) dan sebagian besar negara di Eropa. Sedangkan berdasarkan prinsip "*ius sanguinis*" seseorang yang mempunyai pertalian darah dengan orang tua dari negara tertentu, secara hukum dianggap sebagai warga Negara mengikuti kewarganegaraan orang tuanya meskipun ia lahir di negara lain. Salah satu negara yang menganut prinsip ini adalah Indonesia (Stylianou, Buchan, and Dunn 2015)

Untuk menjadi Negara yang demokratis perlu adanya perangkat lembaga yang independen dimana lembaga tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu. Negara demokratis memerlukan lembaga yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah dimana suara rakyat akan tersalurkan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga pemilihan atau pergantian pemimpin bisa berjalan dengan lancar dan damai tanpa gejolak. Dalam Negara demokrasi kemauan rakyat dan keinginan rakyat merupakan salah satu fondasi yang paling prinsip dalam melakukan penyelenggaraan negara. Dimana para penyelenggara Negara melaksanakan tugas atas dasar pada keinginan rakyat Setelah reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan berubah dari penyelenggaraan Negara yang otoritas ke penyelenggaraan Negara yang demokratis, dimana kemauan dan keinginan rakyat khususnya dalam memilih pemimpin dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dan setelah ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar maka dibentuklah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu yang tugas dan wewenangnya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 banyak terjadi perubahan pada lembaga Negara, ada penambahan lembaga Negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum. Dan ada juga pengurangan atau dihapusnya lembaga Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dahulunya terdapat lembaga DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sekarang dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terdapat pasal yang mengatur Lembaga DPA dan masih banyak lagi yang sifatnya mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita (Masalah 2009).

Sebagaimana kasus yang terjadi pada Pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral pada akhir Juli 2016 menuai polemik. Dikarenakan Archandra Tahar diduga memiliki status kewarganegaraan ganda, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari jabatan Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 20 Agustus 2016.

Ketentuan mengenai kewarganegaraan ganda didalam UU No.3/1946 setelah dua kali mengalami perubahan diatur terutama melalui Pasal 3a. Melalui Pasal 3a, UU No.3/1946 berusaha mencegah terjadinya kewarganegaraan ganda. Pasal 3a menyatakan bahwa: "Seorang Warga Negara Indonesia tersebut dalam pasal 1 bab b, yang mempunyai kewargaan negara dari negeri lain, dapat melepaskan kewargaannya dari Negara Indonesia dengan menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia (huruf tebal dari Penulis)."

Dalam sejarahnya, keadaan bipatride pernah terjadi pada saat UU No.3/1946 sebagaimana telah dirubah sebanyak dua kali berlaku. Sebelum tahun 1955, orang-orang Cina karena peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu dapat dianggap sebagai warga negara Republik Indonesia, sedangkan pada saat yang bersamaan Republik Rakyat Cina tetap beranggapan bahwa orang-orang tersebut adalah warga negaranya. Oleh karena itu, pada tanggal 22 April 1955 diadakan perundingan langsung dan telah ditandatangani perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Soenario-Chou oleh Menteri Luar Negeri RI dengan Republik Rakyat Cina. Perjanjian tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958. Menurut perjanjian tersebut, semua orang Cina yang ada di Indonesia harus mengadakan pilihan tegas dan tertulis, apakah akan menjadi warga negara RI atau tetap berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina. Dengan perjanjian tersebut, diharapkan masalah yang pernah timbul antara RI dengan Republik Rakyat Cina akan terpecahkan.(Ayuni 2016)

Pada tahun 1958, UU No.62/1958 ditetapkan untuk menggantikan undang-undang lama yang mengatur mengenai kewarganegaraan. Tujuan utama dari pembuat UU No.62/1958 pada waktu itu adalah menghindari sebisa mungkin terjadinya kewarganegaraan ganda. Tidak hanya mencegah, namun pada waktu itu kewarganegaraan ganda yang ada harus dihilangkan dan diminimalisir sedapat mungkin.(Oppusuunggu 2008)

UU No.62/1958 ini tidak menghendaki adanya bipatride. UU No.62/1958 dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga digantikan oleh UU No.12/2006. Hampir sama dengan UU yang mengatur mengenai kewarganegaraan sebelumnya, UU No.12/2006 juga tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda pada orang dewasa. Namun UU No.12/2006 mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak dalam kaitannya perlindungan terhadap hak anak. Pada tahun 2014, jaringan diaspora Indonesia telah mengadakan serangkaian seminar nasional tentang “Diaspora Indonesia dan Dinamika Kewarganegaraan”.

Dari pembahasan dalam serangkaian seminar tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan diaspora Indonesia, salah satunya adalah bahwa Pemerintah Indonesia hendaknya memberikan kewarganegaraan ganda kepada eks-Warga Negara Indonesia, baik orang dewasa, anak-anak, serta anak-anak pemegang status kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan UU No.12/2006. Pemerintah Indonesia hendaknya juga memberikan kewarganegaraan ganda kepada orang dewasa maupun kepada anak-anak yang lahir diluar negeri maupun diIndonesia, dimana salah satu tau kedua orang tuanya Warga Negara Indonesia atau eks-Warga Negara Indonesia, namun akibat hukum *Ius Soliataulus Sanguinis* yang berlaku dinegara mereka tinggal menyebabkan subyek kewarganegaraan ganda tersebut otomatis menjadi warganegara asing. Kewarganegaraan ganda merupakan bukti identitas dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dari negara dimana mereka berdomisili.

Pada tahun 2015, komisi III DPR kembali mengusulkan revisi UU Kewarganegaraan untuk masuk Prolegnas 2015-2016 setelah sebelumnya pada Prolegnas 2014 revisi UU Kewarganegaraan merupakan RUU nonprioritas. Dalam perkembangannya, revisi UU Kewarganegaraan masuk lagi dalam Prolegnas 2015-2019 atas usulan DPR. Namun sampai dengan artikel ini selesai belum ada perkembangan pembahasan terhadap RUU Perubahan UU No.12/2006.

Rumusan Masalah

1. Tidak diperbolehkannya kewarganegaraan ganda dalam UU No.62/1958 dan UUNo.12/2006.
2. Dampak dalam bidang hukum apabila kewarganegaraan ganda diperlakukan di Indonesia.

Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan sejarah.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karya ilmiah para Sarjana, hasil-hasil penelitian, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah dan terbitan (media massa) harian atau berkala dibidang hukum, makalah-makalah seminar khususnya tentang konsep warganegara, kewarganegaraan serta hak asasi manusia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik analisis data

Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikutnya, dilanjutkan dengan membaca, serta mencari rumusan mengenai teori dan konsep kewarganegaraan. Selanjutnya mengkaji teori dan konsep tersebut dalam literatur yang menjelaskan tentang landasan berpikir teoritis atau isu hukum yang hendak diteliti. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi, mengkaitkan dan menganalisa semua fakta-fakta dan bahan hukum yang tersedia serta kemudian mencari jawaban atas rumusan masalah.

B. PEMBAHASAN

Tidak diperbolehkannya kewarganegaraan ganda dalam UU No.62 Tahun 1958 dan UU No. 12 Tahun 2006

Menurut Susi Dwi Harijanti, rezim kewarganegaraan Indonesia telah dibentuk oleh dua proses mendasar, yaitu periode dekolonisasi dan pembangunan bangsa pasca-kolonial di era globalisasi. Kedua proses ini, khususnya dekolonisasi tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas beberapa karakteristik penting dalam hukum kewarganegaraan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kewarganegaraan telah banyak dipandang sebagai ‘konstruksi ideologis politik dan sejarah’. Ini mengarah pada cita-cita negara bangsa. Akibatnya, masalah nasionalisme dan kesetiaan mengambil bagian penting dalam semua upaya reformasi kewarganegaraan dan hal tersebut memang menandai hukum kewarganegaraan dan kebijakan di Indonesia (Ersbøll 2015).

Kewarganegaraan merupakan status yang membentuk jembatan antara hak universal setiap manusia untuk hidup bebas dalam kesetaraan dan pengaturan politik serta sosial yang memerlukan pengaturan dalam konstitusi, yang melindungi setiap orang secara setara dibawah hukum dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam kehidupan publik (*Progress in International Law Developments in International* 2007). UU No.62/1958 adalah undang-undang organik yang dibentuk pada saat UUDS 1950 berlaku. Pengaturan mengenai kewarganegaraan didalam UUDS 1950 terutama terdapat dalam Bagian IV dari Bab III mengenai Kewarganegaraan dan Penduduk Negara. Bagian tersebut memuat dua Pasal, yaitu Pasal 5 dan 6. Selain itu, didalam Ketentuan Peralihan Pasal 144 juga disinggung mengenai pengaturan terhadap kewarganegaraan.

Salah satu bunyi pertimbangan penetapan UU No.7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS 1950 adalah “Bahwa negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian hari menjadi republik-federasi. Pertimbangan tersebut merupakan pelaksanaan dari Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan RI yang antara lain berbunyi : “... dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara-Kesatuan, sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945,...”. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara RI 1950 adalah penjelmaan Negara RI Proklamasi. Adanya perubahan rumusan Pembukaan, turut mengubah jiwa pasal-pasal UUD. Tetapi karena Pancasila yang menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, suasana kebatinan UUD 1945 masih diakui pada saat UUDS 1950 berlaku. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Negara RI tahun 1950 tetap berdasarkan jiwa asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Ngadino 2009).

Dengan demikian, asas kerohanian dari warga negara ialah tetap Pancasila sesuai pada saat UUD 1945 masih diberlakukan. Disisi lain, dapat diketahui dari sejarahnya bahwa bentuk Republik 1950 merupakan bentuk kompromi antara kekuatan-kekuatan unitaris dan federalis. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tidak seluruh pokok-pokok pikiran yang mengenai negara maupun warganegara menjelma dalam Batang Tubuh UUDS 1950, kecuali jiwa Proklamasi. Jiwa bangsa Indonesia yang menjelma menjadi segenap bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia dalam daerah Negara Indonesia dalam Batang Tubuh UUD 1945, orang-orang bangsa Indonesia asli dalam Pasal 26 UUD dan orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia dalam pasal 1 baba UU No.3 Tahun 1946 telah terlebur menjadi Warga Negara RI dalam Pasal 1 UU No.62 Tahun 1958.²¹

Maka jika dirunut dari Naskah Persiapan UUD 1945 dalam Muhammad Yamin, Soepomo menyatakan bahwa negara harus menjaga supaya tidak ada warganegara yang memiliki kewarganegaraan ganda (*dwi kewarganegaraan* atau *dubbele onderdaanschap*) dan juga yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*staatloosheid*). Hal ini harus diatur dengan sistem dan peraturan perundang-undangan di Indonesia . (Stylianou, Buchan, and Dunn 2015) Untuk itu, Soepomo mengajukan dasar kewarganegaraan Indonesia, yaitu :

1. *Ius Sanguinis* (prinsip keturunan)

2. *Ius Soli* (prinsip teritorial)

Dari segi histori tentang bangsa dalam arti etnik dalam UUDS ini tidak terlihat dengan jelas, bahwa bangsa yang mendukung dan mendirikan Negara RI adalah segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan keterangan Pemerintah pada saat membicarakan UU No.62/1958 jelas sekali, bahwa Negara RI 1950 tidak didukung oleh bangsa Indonesia dalam arti etnik, karena telah terleburnya orang yang asli dalam daerah Indonesia dengan turunan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara melalui UU No.3/1946, menjadi warganegara RI seperti ditetapkan dalam Pasal 1a UU No.62/1958. (Stylianou, Buchan, and Dunn 2015).

Berdasarkan UUNo.62/1958, persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, diantaranya adalah disamping sudah berumur 21 tahun juga lahir didalam daerah Negara RI atau meskipun tidak lahir didalam daerah Negara RI, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal dalam daerah Negara Indonesia selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut paling akhir atau sama sekali selama sedikit-dikitnya 10 tahun tidak berturut-turut, cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia. B. P. Paulus berpendapat bahwa dengan persyaratan-persyaratan tersebut belum menimbulkan keyakinan, bahwa dengan syarat-syarat itu orang-orang bangsa lain sudah menjadi orang Pribumi sebelumnya. Persyaratan tersebut tidak memaksa (secara psikologis) orang bangsa lain untuk menjadi orang Pribumi yang merupakan syarat mutlak untuk kesatuan warganegara. Pemberian kewarganegaraan RI berdasarkan UU No.62/1958 terlalu dititik beratkan kepada persyaratan yuridis (Stylianou, Buchan, and Dunn 2015).

Lebih lanjut B.P. Paulus menjelaskan bahwa kewarganegaraan yang diberikan berdasar Keputusan Menteri Kehakiman ataupun Presiden menurut UU No.62/1958 bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang mengharuskan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi (pewarganegaraan) diperoleh dengan Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 359-378 366 berlakunya undang-undang yang memberi kewarganegaraan itu. Undang-undang tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, ialah undang-undang yang mengesahkan orang-orang bangsa lain menjadi warganegara. Istilah pengesahan tersebut sesuai dengan pokok pikiran mengenai kewarganegaraan, ialah bahwa ikatan antara orang-orang bangsa lain dengan Negara RI sudah ada sebelumnya, artinya secara sosiologis orang-orang bangsa lain itu sudah menjadi orang Pribumi, atau orang bangsa asli, karena mereka bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara RI. (Stylianou, Buchan, and Dunn 2015)

UU No.12/2006 lahir pada saat UUD NRI Tahun 1945 berlaku. Yang dimaksud dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini adalah UUD yang ditetapkan berdasarkan (melalui) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 beserta perubahan-perubahannya, yaitu perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Sebelum perubahan UUD 1945, pengaturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dalam UUD 1945 terdapat dalam BAB X yang berjudul Warga Negara. Bab X tersebut memuat dua pasal yaitu Pasal 26 dan 27.

Melalui perubahan kedua UUD 1945, pengaturan mengenai kewarganegaraan dalam UUD 1945 mengalami perubahan. Berbedadengan UUD 1945 sebelum

perubahan, UUD 1945 setelah perubahan juga mengatur tentang penduduk. Pengaturan mengenai warganegara dan penduduk dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak berhenti di Pasal 26 seperti yang telah tersebut di atas saja, namun pengaturan mengenai warganegara dan penduduk terutama berkaitan dengan hak-haknya menyebar dipasal-pasal lainnya, misalnya Pasal 27, 28 dan pasal-pasal yang terdapat dalam Bab XA tentang HAM. R. Herlambang P. Wiratraman berpendapat bahwa, Hak kewarganegaraan dalam konteks kedua Bab tersebut, harus di baca secara utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan kualifikasinya, karena perspektif yang diangkat dalam UUD NRI Tahun 145 tersebut adalah bahwa hak-hak fundamental sebagai bagian dari warganegara merupakan segala hak-hak manusia, baik yang sifatnya asasi maupun yang lahir karena hukum tertentu, wajib diberikan perlindungannya bagi setiap warganegara. Inilah yang disebut sebagai constitutional rights, atau hak-hak konstitusional, atau hak-hak fundamental, atau hak-hak dasar. Posisi untuk memahami secara utuh semacam itu menegaskan posisi bahwa negara tidak boleh membatasi pemaknaan, apalagi menegaskan per-lindungan hak-haknya, dalam konsep menyederhanakan pemilahan kualifikasi atas hak dan status atau identitas manusianya.(P. Wiratraman 2013)

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan perlindungan baik kepada setiap warganegara maupun penduduk di Negara RI. Dalam arti bahwa UUD NRI 1945 menjamin perlindungan kepada setiap penduduk tanpa membedakan apakah seseorang tersebut warganegara ataukah orang asing. Misalnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Di sisi lain, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hak-hak yang khusus dijamin untuk warganegara, misalnya Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk menuntut penghidupan yang layak atas kemanusiaan.(Stylianou, Buchan, and Dunn 2015)

Pasal 28 Dayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dari pasal tersebut terlihat bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang. Hak atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya untuk memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga termasuk hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan kan status kewarganegaraan. Hal tersebut adalah sebagaimana dinyatakan oleh Human Rights Council dalam Annual report:

“The right to a nationality implies the right of each individual to acquire, change and retain a nationality. The right to retain a nationality corresponds to the prohibition of arbitrary deprivation of nationality. As indicated above, an explicit and general prohibition of arbitrary deprivation of nationality can be found in numerous international instruments. In particular, it is worth noting that article 15 of the Universal Declaration of Human Rights explicitly provides that no one should be arbitrarily deprived of his or her nationality. The General Assembly, in its resolution 50/152, also recognized the fundamental nature of the prohibition of arbitrary deprivation of nationality.”(Buergenthal 1975)

UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi UUD NRI Tahun 1945, yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan apatride atau seseorang tanpa kewarganegaraan karena UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya bipatride, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Susi Dwi Harijanti berpendapat bahwa dari perspektif hak asasi manusia dalam hukum nasional, dwi kewarganegaraan di Indonesia mendapatkan ruang pengaturan yang lebih luas, mengingat jaminan hak atas kewarganegaraan terdapat juga dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Perubahan status kewarganegaraan, tidak dibatasi pada klaim atas “satu kewarganegaraan”, namun hak untuk memilih kewarganegaraan. Artinya, pilihan satu atau dua kewarganegaraan, sangat terkait dengan politik hukum nasional Indonesia untuk merespon globalisasi, melindungi hak asasi manusia, termasuk mengantisipasi implikasi dari migrasi internasional, sekaligus memberdayakan sumber daya manusia Indonesia diluar negeri untuk kepentingan nasional. (Harijanti et al. 2020)

Latar belakang pembentukan UU No.12/2006 dan UU No.62/1958 sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi pada masa kedua UU tersebut dibentuk. Terdapat beberapa persamaan, misalnya pencegahan apatride dan bipatride, namun kondisi yang berbeda menyebabkan latar belakang pembentukan menjadi berbeda (Harijanti 2014). Dalam kaitan dengan UU No.62/1958, latar belakang pembentukannya dapat dilihat dari maksud pembentuk undang-undang yang memperlihatkan beberapa corak utama (Stylianou, Buchan, and Dunn 2015). Pertama, menyingkap atau memperkecil dwi kewarganegaraan (Harkrisnowo 2020). Dalam kaitan ini, undang-undang bukan saja perlu mencegah tetapi juga menyingkap atau memperkecil bipatride. Lebih lanjut, Sudargo Gautaman menyatakan bahwa keinginan untuk menyingkap, mencegah atau memperkecil bipatride sesuai dengan aliran-aliran hukum kewarganegaraan pada saat itu. Bahkan mengutip pendapat Ko Swan Sik, Gouw Giok Siong berpendapat bahwa bipatride pernah dipandang sebagai “kejahatan terbesar daripada kehidupan internasional dewasa ini” (*the greatest evil of present international life*). (Gautama, n.d.) Latar belakang kedua adalah mencegah tanpa kewarganegaraan. Hal ini dilakukan karena Pemerintah menyadari kondisi-kondisi sulit yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Selain itu, alasan untuk mencegah terjadinya apatride sejalan dengan perkembangan internasional dimana telah dibahas Protokol khusus berkenaan dengan apatride dari Konvensi Den Haag tentang kewarganegaraan di tahun 1930.(Gautama, n.d.) Sudargo Gautama juga menyoroti perlunya dihapuskan praktek pencabutan kewarganegaraan sebagai suatu sanksi pidana terhadap warga yang memiliki pandangan politik berbeda dengan penguasa. Hal itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan melanggar Pasal 15 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Tiada seorangpun dengan semena-mena dikeluarkan dari kewarganegaraannya”.

Sedangkan untuk UU No. 12/2006, berdasarkan penjelasan UU No. 12 /2006 dapat dilihat latar belakang pembentukan UU No. 12/2006. Penjelasan UU No. 12/2006 menyebutkan beberapa alasan yang melatarbelakangi pembentukan UU baru di bidang

kewarganegaraan, yang mencakup alasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, UU No. 62/1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan UU No. 62/1958 adalah UUDS Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap HAM dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU No. 62/1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan diundangkannya UU No. 12/2006, terlihat bahwa Negara RI menunjukkan usaha yang serius untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia tidak lagi dipisahkan berdasarkan etnis yang dianggap “asli”, yang pada kenyataannya juga tidak jelas kriterianya. Selain itu, UU No. 12/2006 juga memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan dan juga anak-anak. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang tersebut, selain mempertimbangkan hasil amandemen UUD 1945 yang sarat dengan perlindungan HAM juga mempertimbangkan banyak instrumen hukum internasional terutama yang berkaitan dengan anti diskriminasi yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Salah satu asas yang dianut oleh UU No. 62/1958 adalah asas untuk melenyapkan kelebihan kewarganegaraan (anti bipatride). Asas anti bipatride ini menghendaki bahwa apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada saat itu juga ia kehilangan kewarganegaraan asalnya. Untuk itu, maka orang yang bersangkutan haruslah:

- a. tidak mempunyai kewarganegaraan
- b. atau kehilangan kewarganegaraannya, apabila ia memperoleh kewarganegaraan RI;
- c. atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraannya lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara RI dengan negara yang bersangkutan RI.

UU No. 62/1958 mengutamakan pencegahan adanya kewarganegaraan ganda, bahkan berusaha memperkecil bipatride yang sudah ada. Usaha untuk melenyapkan bipatride yang ada dilakukan dengan perjanjian dengan negara yang juga menganggap seseorang adalah warganegaranya, misalnya UU No. 2/1958, yaitu Perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRC. Beberapa pasal yang memperlihatkan bahwa UU No. 62/1958 menganut asas anti bipatride adalah Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat 2 huruf (h), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17 huruf (a), (b), dan (j), Pasal I Peraturan Peralihan dan Pasal I Aturan Penutup.

B.P Paulus berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur anti bipatride tersebut justru menjadi “bumerang”, contohnya adalah berkaitan dengan kewarganegaraan peranakan Tionghoa, maka ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf h UU No. 62/1958 harus dihubungkan dengan ketentuan hukum dari negara asal orang-orang Cina, atau ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara RI dan RRC.

Dalam hal penentuan kewarganegaraan Cina, baik RRC maupun Republik Cina Nasionalis (Taiwan) menggunakan asas ius sanguinis. Berdasarkan asas ius sanguinis tersebut, seorang Cina atau keturunan Cina di manapun ia lahir adalah warga negara Cina. Tidak ada seorang Cina pun yang bisa sesuka hatinya melepaskan kewarganegaraan Cina. Untuk menghilangkan kewarganegaraan Cina haruslah ada izin atau pernyataan dari perwakilan negara Cina (RRC/ Taiwan).

Dalam praktek penyelenggaraan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia setelah perwakilan RRC di Indonesia ditutup, baik penyelesaian pernyataan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk kembali menjadi warga negara RI, maupun pewarganegaraan untuk menjadi warga negara RI dan pernyataan memperoleh kewarganegaraan RI untuk wanita RRC yang ingin turut memperoleh kewarganegaraan RI mengikuti suaminya warga negara RI sebagai pelaksanaan Pasal X Perjanjian UU No. 62/1958 jo. Pasal II Peraturan Peralihan dan Pasal V Peraturan Penutup tidak mungkin lagi diperoleh surat keterangan dari Perwakilan RRC untuk menghilangkan kewarganegaraan RRC. Jadi setelah Perwakilan RRC ditutup, apalagi setelah UU No. 2/1958 dinyatakan tidak berlaku lagi, praktis penerimaan orang-orang Cina menjadi warga negara RI adalah bertentangan dengan ketentuan UU No. 62/1958, sebab menimbulkan kembali keadaan sebelum UU No. 62/1958 berlaku, yaitu terjadinya kembali kewarganegaraan ganda di antara warga negara RRC yang memperoleh kewarganegaraan RI.

B.P. Paulus berpendapat bahwa seharusnya dalam undang-undang baru yang nantinya akan menggantikan UU No. 62/1958, perihal kewarganegaraan ganda sebaiknya tidak perlu dijadikan permasalahan untuk memperoleh kewarganegaraan RI. Untuk menanggalkan kewarganegaraan asal cukup dengan pernyataan formal di depan umum ialah dengan mengucapkan sumpah atau janji setia dengan melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing. Bahwa penerimaan orang-orang lain menjadi anggota bangsa Indonesia adalah orang-orang bangsa lain yang secara sosiologis orang bangsa Indonesia asli. Apabila orang bangsa lain itu orang bangsa Indonesia asli dalam arti sosiologis, maka masalah permanence of allegiance yang secara yuridis selalu melekat pada diri seseorang dianggap telah lenyap dengan sendirinya, atau dengan kata lain, pengabulan permohonan seseorang untuk menjadi WNI, karena dianggap orang tersebut telah melepaskan kesetiannya kepada negara asalnya.

Pada dasarnya UU No. 12/2006 juga tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yang dianut oleh undang-undang ini hanyalah merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak. Beberapa pasal yang membuktikan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 tidak menganut kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa adalah Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 huruf (f), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 huruf (a,b,h), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 42.

Terlihat dalam UU No. 62/1958 dan UU No. 12/2006 bahwa kewarganegaraan ganda pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Sepertinya hal ini tidak terlepas dari filosofi kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin “kesetiaan abadi” (perpetual allegiance) yang sebenarnya merupakan masa feodalisme. (Zanna et al. 2015) *Spiro menyatakan bahwa “Through the nineteenth century into the twentieth, dual nationality was condemned as nothing less than a moral abomination. If the law could not stop one from holding the status (the status itself was typically not “illegal”), social norms went a long way towards mitigating its threat to world order.* (Weis and Weis 2004) Dari yang disampaikan Spiro tersebut

terlihat bahwa pada abad 19 menuju abad 20, apabila hukum tidak bisa menghentikan seseorang untuk memiliki kewarganegaraan ganda, maka klaim ketidaksetiaan sebagai sanksi sosial yang menggantikan sanksi hukum akan tersemat pada individu tersebut. Sehingga dapat terlihat bahwa baik UU No. 62/1958 maupun UU No. 12/2006 mengatur bahwa bentuk kesetiaan WNI kepada negaranya adalah dengan tidak mempunyai kewarganegaraan ganda.

Namun, Spiro juga menegaskan bahwa: "The common law doctrine perpetual allegiance, a last legal vestige of feudal conceptions of the relationship between sovereign and subject, could not survive modernity and increasingly global mobility." (Zanna et al. 2015)

Dari argumen tersebut terlihat bahwa doktrin perpetual allegiance tersebut tidak akan bertahan dari modernitas dan mobilitas global yang semakin meningkat.

Dampak dalam bidang hukum apabila kewarganegaraan ganda berlaku di Indonesia

Dalam tataran praktik, kewarganegaraan memberikan banyak manfaat, misalnya dokumen yang dikeluarkan oleh negara dan paspor, berbagai layanan sosial, dan perlindungan diplomatik ("*Fully Human Personhood, Citizenship, and Rights* - Lindsey N," n.d.). Oleh karena itu perubahan politik hukum kewarganegaraan yang mengakibatkan diterapkannya kewarganegaraan ganda pasti diikuti oleh perubahan-perubahan dalam berbagai bidang diantaranya hukum. Diantara beberapa dampaknya dalam bidang hukum apabila kewarganegaraan ganda berlaku akan mengakibatkan berubahnya asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No. 12/2006. Penjelasan Umum UU No. 12/2006 menyatakan bahwa UU No. 12/2006 memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yakni *ius sanguinis*, *ius soli* dan campuran. UU No. 12/2006 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan asas campuran. Tampaknya asas campuran yang dimaksud adalah penggunaan kedua asas kelahiran secara bersamaan (*simultan*). (Harijanti 2014).

UU No. 12/2006 ini pada dasarnya menganut asas kewarganegaraan tunggal dalam arti seseorang hanya menganut satu kewarganegaraan. Namun, undang-undang ini tidak mengesampingkan penggunaan asas kewarganegaraan ganda yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Hanya saja, penggunaannya bersifat terbatas, yakni pada anak-anak. Penggunaan bersifat terbatas ini merupakan pengecualian sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa UU No. 12/2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*), kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualian.

Penjelasan Umum UU No. 12/2006 juga menentukan asas-asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang ini. Beberapa asas khusus tersebut adalah:

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturankewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri;
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya;
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka;
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.(Fernández et al. 2020)

Beberapa asas-asas dan prinsip yang akan berubah dengan penerapan kewarganegaraan ganda adalah asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas dan asas perlindungan maksimum. Perubahan asas perlindungan maksimum terutama berkaitan dengan bahwa seorang WNI juga akan menerima perlindungan dari negara lain selain Indonesia yang juga mengklaim WNI tersebut sebagai warga negaranya. Perubahan asas-asas tersebut tentu saja akan membawa dampak terhadap berubahnya ketentuan yang akan ada dalam undang-undang yang baru beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Handbook for Parliamentarians dinyatakan bahwa “In principle, questions of nationality fall within the domestic jurisdiction of each State. However, the applicability of a State’s internal decisions can be limited by the similar actions of other States and by international law.”(Union 2014) Berdasarkan pendapat tersebut maka pada prinsipnya, masalah mengenai kewarganegaraan termasuk dalam yurisdiksi domestik masing-masing negara. Namun, penerapan keputusan internal negara dapat dibatasi oleh tindakan serupa dari negara lain dan oleh hukum internasional. Dengan kata lain, walaupun hukum nasional lebih menentukan kajian dalam kewarganegaraan. Namun peran hukum internasional juga tidak bisa lepas dengan mudahnya.

Mengutip Susi Dwi Harijati, jika nanti UU No. 12/2006 diubah maka beberapa hal pokok mengenai Dwi Kewarganegaraan yang perlu diatur mencakup:

1. Subjek dwi kewarganegaraan (WNI, eks WNI dengan status kewarganegaraan asing, anak dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA);
2. Kondisi-kondisi yang dapat diperbolehkan perolehan dwi kewarganegaraan (termasuk tata caranya), seperti memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara asing yang juga mengakui dwi kewarganegaraan melalui kelahiran, pewarganegaraan/ naturalisasi, perkawinan campuran/ antar bangsa;
3. Kondisi-kondisi yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang memiliki dwi kewarganegaraan (termasuk tata caranya), seperti melakukan

pengkhianatan negara, dan alasan-alasan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, selain larangan dwi kewarganegaraan;

4. Ketentuan tentang kerja sama dengan negara-negara yang menerima dwi kewarganegaraan untuk memastikan dwi kewarganegaraan diakui secara timbal balik, termasuk ketentuan tentang hak dan kewajiban tertentu dari pemegang status dwi kewarganegaraan, seperti perjanjian masalah pajak (untuk menghindari persoalan double taxation);
5. Ketentuan peralihan yang mengatur proses pengakuan dwi kewarganegaraan, misalnya pendaftaran bagi eks-WNI, anak dari hasil perkawinan campuran berkewarganegaraan asing yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia sebelum UU tersebut diundangkan.(Harijanti 2014)

Ketentuan-ketentuan baru mengenai kewarganegaraan ganda tersebut tentu saja selain harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Selain mengakibatkan perubahan terhadap UUNo.12/2006, revisi tersebut harus diikuti dengan revisi peraturan perundang-undangan yang lain baik peraturan pelaksana dari UU No. 12 /2006 maupun peraturan perundang-undangan di bidang lain yang kemungkinan akan mendapatkan dampak dari perubahan tersebut.

Peraturan pelaksana UU No. 12/2006 yang akan berubah diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No M.01- HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Selain peraturan pelaksana UU No. 12/2006 yang akan berubah, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kewarganegaraan yang akan berubah. Beberapa undang- undang memiliki keterkaitan dengan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara hak dan kewajiban antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Perbedaan hak dan kewajiban tersebut harus ditinjau lebih jauh lagi seiring dengan penerapan kewarganegaraan ganda. Peraturan perundang-undangan yang harus dirubah bersamaan dengan diberlakukannya kewarganegaraan ganda diantaranya adalah yang berkaitan dengan yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan properti. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, misalnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh

OrangAsing yang Berkedudukan di Indonesia, warga negara asing mempunyai keterbatasan dalam hal memiliki properti di Indonesia. Namun, dengan diberlakukannya dengan hak WNI yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak politik. Alece Edwards and Laura van Waas berpendapat bahwa “Nationality is the principal gateway to political participation” (Edwards and Van Waas 2014). Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kewarganegaraan Indonesia merupakan salah satu syarat dalam pengaturan tentang hak berpolitik. Selain itu, dengan di terapkannya kewarganegaraan ganda tentu akan berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang politik. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Liza Mügge di Belanda, kewarganegaraan ganda akan mempunyai dampak terhadap meningkatnya partisipasi politik seorang individu yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Dampak tersebut terutama dirasakan di negara asal individu tersebut yang bisa diindikasikan melalui ketertarikan atau kesanggupan untuk memberikan hak pilih serta pemberian pendapat mengenai pilihan terhadap keluarga atau teman. Yang ketiga adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pelaksananya. Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keimigrasian juga tidak bisa dihindarkan dari perubahan yang terjadi jika kewarganegaraan ganda diterapkan. Ketentuan-ketentuan yang berubah terutama terkait visa, masa tinggal serta dokumen yang harus dimiliki oleh WNI dengan kewarganegaraan ganda.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Tidak diperbolehkannya kewarganegaraan ganda baik dalam UU No. 62 tahun 1958 dan UU No. 12 Tahun 2006 adalah tidak jauh berbeda. UU No. 62/1958 dan UU No. 12/2006 mengatur bahwa kewarganegaraan ganda pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Hal tersebut tidak terlepas dari filosofi kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin “kesetiaan abadi” (perpetual allegiance). Sehingga dapat terlihat bahwa baik UU No. 62/1958 maupun UU No. 12/2006 mengatur bahwa bentuk kesetiaan WNI kepada negaranya adalah dengan tidak mempunyai kewarganegaraan ganda.

Apabila kewarganegaraan ganda diberlakukan di Indonesia akan membawa dampak dalam bidang hukum terutama terhadap beberapa hal. Diantaranya adalah perubahan Asas/Prinsip dalam UU No. 12/2006, perubahan pengaturan tentang larangan kewarganegaraan ganda dalam UU No. 12/2006 serta terhadap harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait misalnya peraturan pelaksana dari UU No. 12/2006, undang-undang yang mengatur kepemilikan properti, undang-undang yang mengatur tentang hak politik, serta UndangUndang tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pelaksananya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Qurrata. 2016. “Book Review: Court of Ethics and Constitutional Ethics.” *Indonesia Law Review* 6 (1): 134. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n1.207>.
- Buergenthal, Thomas. 1975. “The Revised OAS Charter and the Protection of Human Rights.” *American Journal of International Law*. <https://doi.org/10.2307/2200626>.
- Edwards, Alice, and Laura Van Waas. 2014. “Nationality and Statelessness under

Ersbøll, Eva. 2015. "Report on Citizenship Law: Denmark," no. February.
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36504/EUDO_CIT_CR_2015_14_Denmark.pdf?sequence=1.

Fernández, Osvaldo, Shuntong Kang, jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto, and kue tradisional khas Aceh. 2020. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title" 2017 (1): 1-9.

"Fully Human Personhood, Citizenship, and Rights - Lindsey N." n.d.

Gautama, Sudargo. n.d. "More than Half a Century after Independence , Civil Law and Civil Procedure Law in Indonesia Are Still under the Influence of the Dutch Legal System . As a Colony of the Netherlands , the Netherlands Indies in Its Legal System in Civil Matters Closely Followed the Law and Prevailing Doctrines of the ' Motherland ' under the so-Called Concordance Principle . I This Principle Was Embodied in Article 131 (2) (a) of the Colonial Quasi Constitution . 2 It Was , of Course , Aban- Decisions and Dutch Scholarly Opinions and Interpretations Are Still Widely While the Concordance Principle Applied to the Part of the Law That Was of European Origin , the Colonial Legal Regime Was Simultaneously Based on a System of Different Substantive and Procedural Civil Law for Various Racially Defined Sub-Divisions of the Population and for Different Culturally Defmed Parts 163 of the above Quasi Constitution . Although the Legal Distinctions along Racial" 6: 87-103.

Harijanti, Susi Dwi. 2014. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri." *Jurnal Hukum ius Quia iustum* 21 (4): 531-58.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>.

Harijanti, Susi Dwi, Firman Manan, Mei Susanto, and Ilham Fajar Septian. 2020. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President : Significances and Implications Natural Born Citizen Sebagai Syarat Presiden Indonesia : Arti Penting Dan Implikasi A . Introduction In 2018 , Indonesia ' s People Underwent a Heated Discussion on the Requirements to Become the President of Indonesia . A Constitutional Law Expert , Yusril Ihza Mahendra , Says That Basuki Tjahaja Purnama (Former Governor of DKI Jakarta) Does Not Meet the Requirements to Become a Presidential Candidate . 1 According to Yusril , Basuki Does Not Fulfill One of the Requirements According to Article 6 Paragraph (1) of the Amendment of the 1945 Constitution , ' A Presidential Candidate and a Vice Presidential Candidate Has to Be a Natural-Born Indonesian Citizen ... ' , Because Basuki Was Born as Foreign Er . Basuki ' s Father , Tjoeng Kiem Nam (Indra Tjahaja Purnama), Chose Chinese Citizenship between Indonesia and China in the Determination of Citizenship in 1962 . Since Basuki Was Born after the Determination of Citizenship in 1966 , He Is Automatically Not an Indonesian Citizen . Yusril Insists That Basuki Started to Become an Indonesian Citizen in 1986 after His Father , According to the Indonesian Citizenship Certificate (Surat Bukti Keterangan Kewarganegaraan Indonesia / SBKRI), Naturalized and Became an Indonesian Basuki ' s Family Denies Yusril ' s Statement That Their Father Was Not an Indonesian Citizen . According to Basuki ' s Brother , Harry Basuki , His Father Has Never Been A," 289-313.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2020. "Jurnal Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1 (1): 1-26.

Masalah, A Latar Belakang. 2009. "Bab I Pendahuluan مَـلُومٌ مِّنْهُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ هَبْ قَحْلًا فَهَلْ عَقَّبْتَ يَدَيْكَ مِّنْ ذُلٍّ أَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَائِزِينَ" Journal Information 10: 1-16.

Muliadi, Muliadi. 2019. "ANALISIS HUKUM STATUS KEWARGANEGERAAN GANDA

- MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.” *Res Nullius Law Journal*.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495>.
- Ngadino, Agus. 2009. “Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan.” *Simbur Cahaya* XIII (38).
- Oppusuuggu, Yu Un. 2008. “Memoriam Prof.,” no. September.
- P. Wiratraman, R. Herlambang. 2013. “Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/Puu-Iv/2006.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.71>.
- Progress in International Law Developments in International*. 2007.
- Stylianou, Neophytos, Iain Buchan, and Ken W. Dunn. 2015. “A Review of the International Burn Injury Database (IBID) for England and Wales: Descriptive Analysis of Burn Injuries 2003-2011.” *BMJ Open* 5 (2): e006184.
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006184>.
- Union, The Inter-parliamentary. 2014. “INTER-PARLIAMENTARY UNION C o n s t i t u t i o n a l & P a r l i a m e n t a r y I n f o r m a t i o n .”
- Weis, Judith S., and Peddrick Weis. 2004. “Metal Uptake, Transport and Release by Wetland Plants: Implications for Phytoremediation and Restoration.” *Environment International* 30 (5): 685–700. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2003.11.002>.
- Zanna, Nicola, Andrea Merlettini, Giuseppina Tatulli, Lorenzo Milli, Maria Letizia Focarete, and Claudia Tomasini. 2015. “Hydrogelation Induced by Fmoc-Protected Peptidomimetics.” *Langmuir* 31 (44): 12240–50.
<https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b02780>.